



RELEASE
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI XIII DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025
DENGAN JAJARAN KANWIL HUKUM DAN HAM KEMENKUMHAM BALI
6 – 10 DESEMBER 2024

Komisi XIII DPR RI mengadakan rapat dengan jajaran Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Bali pada Jum'at, 6 Desember 2024 di Ruang Rapat Hotel Harris, Denpasar. Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Denpasar, Bali. Tim Kunjungan Kerja Reses ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H. dan Anggota Komisi XIII DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesiapan keimigrasian dan pemasyarakatan untuk mereformasi dan transformasi yang lebih meningkatkan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sehingga dengan berubahnya imigrasi dan pemasyarakatan menjadi kementerian diharapkan “tidak sekedar *business as usual*”, tetapi harus lebih fokus dan memberi kemajuan positif dalam melaksanakan tupoksi, baik imigrasi maupun pemasyarakatan, serta dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung pencapaian reformasi dan transformasi kelembagaan keimigrasian dan pemasyarakatan yang lebih efektif, efisien, dan berdaya guna bagi SDM bangsa. Selain itu, perbaikan sistem pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan dengan tetap memenuhi HAM dan menjamin reintegrasi sosial sehingga setelah bebas mampu mendapatkan pekerjaan kembali.

Sebelum rapat dengan jajaran Kanwilkumham Bali, Tim Kunker Komisi XIII DPR RI melakukan peninjauan ke layanan Imigrasi dan *Visa on Arrival* di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Selain itu, Tim Kunker juga meninjau Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali.

Selanjutnya, rapat dengan Kanwilkumham Bali dipimpin oleh Hj. Dewi Asmara, dengan pemaparan dari Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkumham. Namun, sebelumnya Wakil Menteri (Wamen) Imipas memberikan sambutan dan mengucapkan terima kasih atas Kunker Komisi XIII DPR RI ke Kanwilkumham, Denpasar, Bali. Selain dihadiri oleh Wamen Imipas, rapat juga dihadiri oleh Plt. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali, Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Direktur TI dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Bali, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Bali, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Bali, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan UPT Pemasyarakatan se- Provinsi Bali, beserta jajaran.

Dalam paparannya, Kepala Divisi Imigrasi Kanwilkumham Bali, Samuel Toba, menyampaikan capaian dan pelaksanaan program. Selain itu, juga dikemukakan kendala Keimigrasian Bali, yaitu kurangnya fasilitas penginapan mess untuk mendukung pelaksanaan tugas karyawan; kebutuhan tunjangan bagi karyawan di luar jam kerja dan dukungan kesehatan; memerlukan penyempurnaan dan peremajaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Rudenim; serta kurangnya fasilitas pelayanan di kantor imigrasi. Untuk itu, Kanwilkumham mengharapkan peningkatan anggaran pembangunan sarana prasarana serta peningkatan anggaran tunjangan dan sumber daya manusia Keimigrasian.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilcumham Bali, I Putu Murdiana, menyampaikan kendala yang dihadapi oleh Divisi Pemasyarakatan di Bali yaitu belum memadainya sarana dan prasarana pengadaan senjata di UPT serta sarana pembinaan untuk kebutuhan alat pengamanan; kurangnya petugas baik di bidang pengamanan maupun tenaga kesehatan serta kekurangan petugas dengan kategori “terlatih/terampil”; kurangnya anggaran pelatihan kerja bagi warga binaan dan anggaran perawatan bangunan dan sarana prasarana UPT; serta kondisi fasilitas, sarana dan prasarana lapas/rutan bali yang belum memenuhi standar. Divisi Pemasyarakatan juga mengidentifikasi akibat adanya overkapasitas yaitu terjadi peningkatan risiko konflik antar narapidana, pelayanan dan pembinaan yang tidak optimal, dan sangat rentan dengan masalah kesehatan, serta berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh petugas. Divisi Pemasyarakatan juga mengharapkan peningkatan anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan anggaran sumber daya manusia Pemasyarakatan.

Rapat dengan Kanwilcumham Bali menghasilkan dua poin penting, yaitu:

1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi upaya pelayanan keimigrasian dengan sistem *automatic gate* di bandara Ngurah Rai Bali, dan untuk itu tetap meminta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan peningkatan pengawasan dengan keamanan data base/*security data base* pada *system automatic gate*.
2. Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali untuk memasukkan dalam perencanaan anggaran atas perlunya penambahan anggaran untuk mengurangi dan atau menyelesaikan kendala-kendala Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Denpasar, 6 Desember 2024

Tim Kunker Reses Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Bali